

RENCANA KERJA TAHUN 2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Secara substansi, dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 memuat hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indicator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, 28 Juli 2023

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Drs. Isnawa Adji, M.A.P.
NIP. 197205241992031002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | i-2 |
| Daftar Isi..... | i-3 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 30 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 36 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 33 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 36 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 37 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 38 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 39 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | |
| BAB V PENUTUP | |

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan RKPD Tahun 2022. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2022 dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
18. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXXV tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 53/SE/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2023-2026 kedalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Masih Merujuk dengan dokumen RPD Tahun 2023-2026, Prioritas Utama Pembangunan Tahun 2024 yaitu isu strategis terkait Penanggulangan Banjir dimana untuk tahun 2024 kegiatan Prioritasnya adalah Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, Upaya pencegahan banjir dan Penanganan pasca banjir

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Akhir Renja BPBD tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (n-1); analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi nama Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rincian program, kegiatan dan anggaran indikatif Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Memuat tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2025.

Secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 telah menganggarkan pembiayaan seluruh program dan kegiatannya sebesar Rp. 81.174.241.198,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 75.605.200.729,- atau 93,14 %. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penanggulangan Bencana BPBD memiliki 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BPBD memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.
- Program Penanggulangan Bencana UPT PDIK memiliki 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT PDIK memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 11 (Sebelas) Sub Kegiatan.

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
(sampai dengan Tahun 2023)

| Perangkat Daerah | Kode | Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | Target Program/kegiatan/Sub kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023) | Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023 | | Ket |
|------------------|---------|---|---|--|--|---|-------------|--|--|---|------------------|-----|
| | | | | | Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 | Capaian (%) | Realisasi Program/kegiatan/Sub kegiatan/Rencana s.d tahun 2023 | | Capaian Rentra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/5) | 12 | |
| BPBD | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tidak Ada Target | |
| | | | Persentase masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dalam | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 100% | N/A | N/A | | | |

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | penyelenggaraan PB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| BPBD | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Jumlah kelurahan yang diberikan informasi rawar bencana | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | Jumlah dokumen review rencana kontijensi banjir yang tersedia jumlah dokumen rencana kontijensi gempa bumi yang tersedia Target : 1 Dokumen | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BPBD | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana | 1. jumlah laporan terselenggaranya Hari Keselamatan | 6 | 2 | 2 | 100% | 100% | 2 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | Provinsi (Per Jenis Bencana) | n Bencana Target : 1 2. laporan Jumlah sekolah madrasah aman bencana yang terbina Target : 1 laporan | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah aparaturnya, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB Target : 1.600 orang | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 100% | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah aparaturnya, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB Target : 1.600 orang | 4800 | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 1600 | 4800 | 100% | 1600 | 1600 | 100% | 4800 | 100% | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi | 45 | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 45 | 100% | 15 | 15 | 100% | 45 | 100% | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Yang tersedia Target : 15 jenis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana pendukung psikososial yang tersedia Target : 5 jenis | 5 | 5 | 5 | 100% | 15 | 15 | 100% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana yang tersedia di Ruang Posko Pengendali Operasi Target : 20 Jenis | 20 | 20 | 20 | 100% | 0 | 20 | 100% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang tersedia Target 1 Jenis | 18 | 6 | 6 | 100% | 6 | 18 | 100% | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah fasilitas publik dan gedung yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana Target : 20 gedung | 30 | 10 | 10 | 100% | 10 | 30 | 100% | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.07 | Penanganan Pascabencana Provinsi | Persentase Penanganan Pasca bencana Provinsi yang tertangani | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Target : 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Target : 3 kegiatan | 6 | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 100% | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Target : 100 persen | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.03.02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Jumlah laporan piket siaga bencana Target : 12 laporan | 36 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 100% | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | jumlah buffer logistik penanggulangan bencana yang tersedia Target : 27 jenis | 81 | 27 | 26 | 96% | 27 | 80 | 98,7% | | | | | | | | |
| BPBD | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| BPBD | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan Internal dan Eksternal Kantor, dengan nilai: 4 (persepsi sesuai PermenPAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|---|-----|----|----|----|-----|------|------|---|---|---|------|--|
| BPBD | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan alat tulis kantor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBM-nya terpenuhi | 112 | 26 | 26 | 60 | 112 | 100% | | | | | 100% | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | 100% | |
| BPBD | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | 100% | |
| BPBD | 1.05.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | 100% | |
| BPBD | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | 100% | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|---|----|----|---------|------|----|----|------|
| BPBD | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah KDO/KDO khusus yang memiliki surat izin | 76 | 14 | 14 | 100% | 46 | 76 | 100% |
| BPBD | | | Jumlah KDO/KDO khusus yang laik jalan/ berfungsi | 76 | 14 | 14 | 100% | 46 | 76 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja Target : 4 Nilai | 4 | 4 | 4 Nilai | 100% | 4 | 4 | 100% |
| UPT PDIK | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.3 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | penyelenggaraan PB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| BPBD | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Jumlah kelurahan yang diberikan informasi rawar bencana | 25 | 25 | 25 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| BPBD | 1.05.03.1.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | Jumlah dokumen review rencana kontijensi banjir yang tersedia jumlah dokumen rencana kontijensi gempa bumi yang tersedia Target : 1 Dokumen | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BPBD | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana | 1. jumlah laporan terselenggaranya Hari Kesiapsiagaan | 6 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 100% | 2 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | Provinsi (Per Jenis Bencana) | n. Bencana Target : 1 2. laporan Jumlah sekolah madrasah aman bencana yang terbina Target : 1 laporan | | | | | | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | jumlah aparaturnya, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB Target : 1.600 orang | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | jumlah aparaturnya, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB Target : 1.600 orang | 4800 | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 4800 | 1600 | 100% | 4800 | 1600 | 100% | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi | 45 | 15 | 15 | 100% | 15 | 45 | 15 | 100% | 45 | 15 | 100% | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Yang tersedia Target : 15 jenis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana pendukung psikososial yang tersedia Target : 5 jenis | 5 | 5 | 5 | 100% | 15 | 15 | 15 | 100% | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana yang tersedia di Ruang Posko Pengendali Operasi Target : 20 Jenis | 20 | 20 | 20 | 100% | 0 | 20 | 20 | 100% | | | | | | | |
| | | | Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang tersedia Target 1 Jenis | 18 | 6 | 6 | 100% | 6 | 18 | 18 | 100% | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah fasilitas publik dan gedung yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana Target : 20 gedung | 30 | 10 | 10 | 100% | 10 | 30 | 30 | 100% | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.07 | Penanganan Pascabencana Provinsi | Persentase Penanganan Pasca bencana Provinsi yang tertangani | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100% | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Target : 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Target : 3 kegiatan | 6 | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 100% | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Target : 100 persen | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.03.02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Jumlah laporan piket siaga bencana Target : 12 laporan | 36 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 100% | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | jumlah buffer logistik penanggulangan bencana yang tersedia Target : 27 jenis | 81 | 27 | 26 | 96% | 27 | 80 | 98,7% | | | | | | | | | |
| BPBD | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| BPBD | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan Internal dan Eksternal Kantor, dengan nilai: 4 (persepsi sesuai PermenPAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| BPBD | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|---|-----|----|----|----|-----|------|----|-----|------|------|---|---|---|------|--|
| BPBD | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan alat tulis kantor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBM-nya terpenuhi | 112 | 26 | 26 | 60 | 112 | 100% | 60 | 112 | 100% | | | | | | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | |
| BPBD | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | |
| BPBD | 1.05.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | |
| BPBD | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|---|----|----|---------|------|----|----|------|--|--|
| BPBD | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah KDO/KDO khusus yang memiliki surat izin | 76 | 14 | 14 | 100% | 46 | 76 | 100% | | |
| BPBD | | | Jumlah KDO/KDO khusus yang laik jalan/ berfungsi | 76 | 14 | 14 | 100% | 46 | 76 | 100% | | |
| BPBD | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja Target : 4 Nilai | 4 | 4 | 4 Nilai | 100% | 4 | 4 | 100% | | |
| UPT PDIK | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.3 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta**

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| UPT PDIK | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Jumlah kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana | 82 | 82 | 82 | 100% | 82 | 82 | 82 | 100% | |
| UPT PDIK | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah lokasi terpasangnya poster dan leaflet mengenai Layanan Jakarta Siaga 112 dan aplikasi Jakarta Aman | 125 | 50 | 50 | 100% | 25 | 125 | 125 | 100% | |
| UPT PDIK | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase optimalisasi penyampaian informasi kebencanaan | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100% | |
| UPT PDIK | 1.05.03.1.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | Jumlah renewal ISO 9001:2015 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 3 | 100% | |
| UPT PDIK | 1.05.03.1.04.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah laporan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan prasarana | 174 | 58 | 58 | 100% | 58 | 174 | 174 | 100% | |
| | | | Jumlah laporan Pemeliharaan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan | 6 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 6 | 100% | |
| | | | Jumlah laporan termantfaatkan nya DIMS, EWS, medsos dan call center 112 | 72 | 24 | 24 | 100% | 24 | 72 | 72 | 100% | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|--|----|----|---|------|----|----|------|--------------|
| | | | Jumlah peralatan Early Warning System (EWS) yg beroperasi | 93 | 31 | 0 | 0% | 31 | 31 | 33% | Gagal Tender |
| UPT PDIK | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan Internal dan Eksternal Kantor, dengan nilai: 4 (persepsi sesuai PermenPAN) | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | |
| | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|--|---|---|---|---|------|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | administrasi keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | | | | | | | |
| | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indeks kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Indeks kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan rumah tangga kantor | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | | | | | | | |
| | 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Indeks kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | | | | | | | |
| | 1.05.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah KDO/KDO khusus yang dibutuhkan BBM-nya terpenuhi | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | | | | | | | |
| | 1.05.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | makanan dan minuman | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.09 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks kepuasan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan perlengkapan kantor | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | persentase terbayarnya abodemen dan tagihan telepon call center 112 BPBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 300% | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai kepuasan terhadap ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | | |

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta**

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|--|----|---|---|----|------|----|-------|------|--|
| UPT PDIK | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan | Jumlah KDO/KDO khusus yang laik jalan/ berfungsi | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | |
| | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kerja yang laik fungsi | 96 | 0 | 0 | 32 | 0% | 64 | 66,7% | | |
| | 1.05.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai keputusan terhadap kebersihan kantor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 4 | 100% | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. BPBD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang terdiri dari fase pra bencana, fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan fase pasca bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase prabencana/fase tidak terjadi bencana difokuskan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pelatihan, pembinaan dan simulasi penanggulangan bencana bagi siswa dan masyarakat, relawan serta aparatur, serta penyediaan sarana prasarana early warning system/ Sistem Peringatan Dini Bencana melalui UPT. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana difokuskan pada upaya untuk melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta kebutuhan warga terdampak; koordinasi dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase pasca bencana difokuskan pada 2 (dua) upaya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cakupan pelayanan assessment penilaian kerusakan, pendampingan masyarakat melalui koordinasi pemulihan sosial dan ekonomi; pemulihan pelayanan kesehatan; pemulihan dan budaya; pemulihan fungsi pelayanan publik; serta mengkoordinasikan pembangunan kembali prasarana dan sarana.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| No | Indikator | Standar Pelayanan Minimum/Standar Nasional | Indikator Kinerja Kunci | Target Rencana Strategis Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|---|---|---|------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana | | Indeks Ketahanan Daerah | 2,30 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 2,15 | 0,55 | 0,63 | 0,68 | | |
| 2 | Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah | | Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 3 | Persentase masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 0,78 | 0,84 | 0,92 | 1 | 0,7 | 0,92 | 100% | 100% | | |
| 4 | Persentase Kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1x24 jam | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase pengungsi terlayani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Persentase Pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana | - | Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator kinerja “Indeks Risiko Bencana”, secara umum sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu indeks yang semakin menurun. Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta sesuai data yang dihitung dan dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2021 adalah sebesar 60,43%. Sedangkan untuk tahun 2023 menggunakan Indeks Ketahanan Daerah merupakan salah satu komponen dalam Indeks Risiko Bencana. IKD terdiri dari tujuh fokus prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Tahun 2023 ditargetkan 0,58 %.
- b. Capaian indikator kinerja “Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” secara umum sesuai target yang telah ditetapkan. Namun hal ini perlu ditingkatkan terus menerus setiap tahun karena jumlah masyarakat di DKI Jakarta masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang sudah diberikan pelatihan dan pemahaman tentang pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana
- c. Capaian Indikator kegiatan “Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana”, secara umum sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 100%. Namun hal ini perlu ditingkatkan terus menerus setiap tahun karena jumlah masyarakat di DKI Jakarta masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang sudah diberikan pelatihan dan pemahaman tentang pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana. Namun hal ini perlu ditingkatkan untuk penyusunan kebijakan dan penanggulangan bencana non Alam seperti pandemi Covid-19.
- d. Capaian kinerja pada indikator “Persentase Kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1x24 jam” mencapai target sebesar 100%, hal ini dapat terus ditingkatkan karena kejadian bencana harus dimonitor 1 kali 24 jam setiap hari dan keberadaan gudang logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 5 (lima) Kantor Walikota. Namun dukungan logistik kejadian bencana yang dilaksanakan oleh BPBD bersifat

pendukung karena pada prinsipnya yang melakukan pemenuhan tersebut adalah SKPD/OPD terkait fungsinya.“

- e. Capaian Indikator persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana mencapai target sebesar 100% dengan formula pengukuran (Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian yang memerlukan pendampingan dikali 100%)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 18 untuk memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar SPM sub urusan bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah 1) pelayanan informasi rawan bencana, 2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD/UKPD di Provinsi DKI Jakarta, kementerian dan lembaga, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga non pemerintah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD diantaranya yaitu :

1. Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana yang disebabkan karakteristik masyarakat Jakarta yang heterogen.
2. Masih lemahnya sistem komando dilapangan untuk mengkoordinasikan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi karena adanya ego sektoral instansi/lembaga.
3. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan
4. Belum terintegrasinya sistem pelayanan penanggulangan bencana di seluruh SKPD teknis penanggulangan bencana.
5. Masih minimnya sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana.

6. Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami resiko/ ancaman bencana pada gedung bertingkat
7. Rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
8. Kurangnya SDM BPBD Provinsi DKI Jakarta baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam hal kemampuan kebencanaan.

BPBD juga mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's). Program SDG's yang didukung oleh BPBD terdapat pada tujuan yang ke 1 (satu), 13 (tiga belas) dan ke 17 (tujuh belas), dari 17 (tujuh belas) tujuan (Goals). Adapun target dan indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
2. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
3. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
4. Pendampingan psikososial korban bencana
5. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi
6. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
7. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk
8. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
9. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD terdapat tantangan dan peluang yang harus dihadapi, yaitu :

- Tantangan :
 1. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan pengurangan risiko bencana.
 2. Terbatasnya kewenangan lembaga dan penggiat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana (belum terpenuhinya regulasi yang menjadi pedoman penggiat bencana untuk melaksanakan PB).
 3. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih bersifat sektoral.
 4. Masih rendahnya kemampuan petugas pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

5. Masih rendahnya pemahaman SKPD teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Belum sepenuhnya integrasi sistem informasi data.
7. Masih rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah penanggulangan bencana.
8. Belum memadainya fasilitas pendukung tempat evakuasi (tempat evakuasi yang tersedia di RPTRA masih sangat sederhana).
9. Belum seluruhnya pengelola gedung memahami pengurangan risiko bencana gedung bertingkat.
10. Sering terjadi pergeseran titik lokasi rawan bencana.

- Peluang

1. Perilaku masyarakat yang masih bersifat gotong royong dan mudah diarahkan.
2. Tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran penggiat bencana dalam penanggulangan bencana.
3. Potensi SKPD tentang tugas fungsi dan kewenangan sangat tinggi.
4. Tersedianya SDM dan APBD untuk peningkatan kapasitas aparat dalam penanggulangan bencana.
5. Adanya komitmen SKPD untuk melakukan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
6. Tersedianya APBD dan komitmen SKPD dalam mengintegrasikan sistem informasi data.
7. Tersedianya APBD dan SDM teknis aparat pemerintah penanggulangan bencana.
8. Kepedulian stakeholder dalam penanggulangan bencana pada pra, saat, dan pasca bencana.
9. Adanya update informasi pergeseran titik rawan bencana dari aparat kelurahan.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BPBD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Koordinasi antar OPD dan Lembaga terkait penanggulangan bencana;
2. Kepedulian masyarakat terhadap pengurangan bencana; dan
3. Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana .

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2023 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2023 terdapat penambahan kegiatan yang mendukung Kegiatan Strategis Daerah “Pengelolaan Pengurangan Resiko Bencana”, perubahan nomenklatur kegiatan serta penambahan kegiatan baru berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta. Pada rencana kerja tahun 2022 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2022.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|--|--|----------------------|---|-------------------|------------------------------|--|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| No | Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatorif (Rp.000) | Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatorif (Rp.000) | Catatan penting |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | |
| Program Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Provinsi DKI Jakarta | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 12000 | 4,324,590,493 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 12000 | 4,324,590,493 | |
| 2 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1 | 188,866,901 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1 | 188,866,901 | |
| 3 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana | 12 | 1,504,000,000 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana | 12 | 1,504,000,000 | |
| 4 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana | 12 | 1,504,000,000 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana | 12 | 1,691,000,000 | |
| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah aparaturn, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan | 2000 | 1,587,671,595 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | Jumlah aparaturn, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan | 2000 | 1,587,671,595 | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|----------------|---|--|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Penanggulangan Bencana | 267 | 157,764,101 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Penanggulangan Bencana | 267 | 157,764,101 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | | | | Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 12 | 20,775,931,002 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 12 | 20,775,931,002 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi | 1 | 24,200,000 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi | 1 | 24,200,000 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan | 2 | 536,394,606 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan | 2 | 536,394,606 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana | 267 | 867,085,393 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana | 267 | 867,085,393 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan | 1 | 54,000,000 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan | 1 | 54,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|--|--|---|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | Kesiapsiagaan bencana | Kesiapsiagaan Bencana | | | Kesiapsiagaan bencana | Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | |
| | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 60 | 15,750,000 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah Aparatur Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 60 | 15,750,000 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | 1 | 2,002,248,799 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | 1 | 2,057,035,036 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 1 | 105,243,750 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 1 | 105,243,750 | | | | | | | |
| 15 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | 12 | 4,859,963,963 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | 12 | 4,859,963,963 | | | | | | | |
| Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis | 329 | 2,738,314,604 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis | 329 | 2,738,314,604 | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|----|----------------|---|----|-------------|--|
| | | | Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | | | Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | 20 | 290,553,969 | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | 20 | 290,027,275 | |
| 17 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | | | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | 12,100,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 63 | 35,808,329,291 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 2 | 5,000,000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 | 148,809,375 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 | 124,333,475 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan | 1 | 135,361,348 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| 23 | | | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|----|---------------|---|--|--|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| 34 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 27,243,034 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 27,243,034 | | | | | | | | |
| 35 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 | 1,255,803,539 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 | 1,255,803,539 | | | | | | | | |
| 36 | Fasilitas Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 | 5,400,000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 | 5,400,000 | | | | | | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Pengadaan Mebel | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Paket mebel yang Disediakan | 1 | 201,571,385 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket mebel yang Disediakan | 1 | 201,571,385 | | | | | | | | |
| 38 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 | 357,420,116 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 | 263,160,469 | | | | | | | | |
| 39 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 187,496,457 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 187,496,457 | | | | | | | | |
| 40 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 64 | 997,122,173 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 64 | 997,122,173 | | | | | | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|----|-------------|---|--|----|-------------|--|
| 41 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 | 109,849,892 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 | 104,170,736 | |
| 42 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 | 125,737,460 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 | 125,737,460 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 43 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 112,181,040 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 112,181,040 | |
| 44 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 725,162,648 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 725,162,648 | |
| 45 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 56,090,520 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 56,090,520 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 46 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Provinsi DKI Jakarta | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 | 63,036,198 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 | 63,036,198 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan yang berasal dari usulan Musrenbang yang disampaikan pada saat serap fase RKPD tahun 2023 adalah Usulan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh masyarakat.

Usulan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta karena sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana juga sesuai dengan standar pelayanan minimal sub urusan kebencanaan dengan capaian indikator yaitu Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran Volume | Catatan |
|-----|--|------------------------------|---|----------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Kelurahan Cengkareng Timur | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana | 18 orang | Merupakan kegiatan non fisik |
| 2 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Kelurahan Kebon Kosong RW. 6 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana | 30 orang | Merupakan kegiatan non fisik |

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Semangat Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang penanggulangan bencana adalah: **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya untuk mengkoordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi *“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”* secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
- b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non

pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 dan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2020-2024,.

Prioritas Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa dan harta benda pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana sosial ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Merujuk kepada prioritas tersebut, ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan kebencanaan BPBD selaku OPD pelaksana kewenangan penanggulangan bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terutama pada prioritas pembangunan manusia, bentuk penjabaran pelaksanaan prioritas meliputi :

- Pelayanan informasi rawan bencana provinsi.
- Peningkatan kemampuan dan penanganan kebencanaan bagi : warga masyarakat, aparatur pemerintah serta siswa sekolah.
- Penguatan kapasitas dan Simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung.
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pendampingan Psikososial bagi masyarakat pasca Bencana.

Peningkatan *early warning system* dan pelayanan kebencanaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator.

Gambar 3.1

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 3 (tiga) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs yaitu tujuan “tanpa kemiskinan”, tujuan “menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan” dan tujuan “mengambil tindakan cepat untuk perubahan iklim dan dampaknya”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1 Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
- 2 Jumlah korban meninggal dan terkena dampak bencana
- 3 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
- 4 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- 5 Pendampingan psikososial korban bencana
- 6 Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)
- 7 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
- 8 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan

- 9 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Provinsi DKI Jakarta. Setiap kegiatan yang dilakukan harus mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merujuk kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk mendukung capaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan isu-isu strategis, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD 2023-2026. Untuk mendukung peran tersebut, BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat Jakarta terutama di daerah rawan bencana, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik, membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di lokasi rawan bencana, pemenuhan kebutuhan pengungsi serta pendampingan pemulihan pasca bencana.

Dengan mempertimbangkan peran diatas, yang akhirnya diharapkan masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, maka prioritas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2024 antara lain:

1. Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam.
3. Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana
4. Pelayanan informasi rawan bencana provinsi.
5. Peningkatan kemampuan dan penanganan kebencanaan bagi warga masyarakat, aparatur pemerintah serta siswa sekolah.
6. Penguatan kapasitas dan Simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung.

7. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
8. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
9. Peningkatan early warning system dan pelayanan kebencanaan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Renja 2024 menggunakan program yang terdapat di Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2026 terdiri 1 (satu) program utama dan 1 program operasional. Program tersebut adalah:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Program Penanggulangan Bencana BPBD memiliki 4 (empat) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BPBD memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.
 - Program Penanggulangan Bencana UPT PDIK memiliki 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT PDIK memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah



Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Berikut Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (UPT PDIK) Tahun 2024 beserta rencana pendanaannya yang ditampilkan dalam Tabel 4.1 .

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------------------|---------|---|---|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BPBD | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dalam penyelenggaraan PB | Provinsi DKI Jakarta | 0,84% | 35.696.992.135 | APBD | | 0,92% | 48.919418.766 |
| | | | Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana | | 100% | | | | 100% | |
| | | | Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam | | 100% | | | | 100% | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja/ Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BPBD | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana. | Provinsi DKI Jakarta | 100 persen | 3.826.756.330 | APBD | | 100 persen | 3.826.756.330 |
| BPBD | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota | Provinsi DKI Jakarta | 329 Orang | 3.826.756.330 | APBD | | 329 Orang | 3.826.756.330 |
| BPBD | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah aparaturn, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 2000 orang | 21.335.196.020 | APBD | | 2000 orang | 21.335.196.020 |
| BPBD | 1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 267 Orang | 2.324.030.140 | APBD | | 267 Orang | 2.324.030.140 |
| BPBD | 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 12 Dokumen | 18.326.418.162 | APBD | | 12 Dokumen | 18.326.418.162 |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Prakiran Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 267 Orang | 100.542.580 | APBD | | 267 Orang | 100.542.580 | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.09 | Penyusunan Rencana Kontijensi | jumlah dokumen rencana kontijensi yang tersedia | Provinsi DKI Jakarta | 1 dokumen | 24.200.000 | | | 1 dokumen | 24.200.000 | |
| BPBD | 1.05.03.1.02.10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan | Provinsi DKI Jakarta | 3 Laporan | 560.005.138 | APBD | | 3 Laporan | 560.005.138 | |
| BPBD | 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 100% | 5.777.070.254 | APBD | | 100% | 5.777.070.254 | |
| BPBD | 1.05.03.1.03.02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 12 Laporan | 1.657.075.000 | APBD | | 12 Laporan | 1.657.075.000 | |
| BPBD | 1.05.03.1.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 195.000.000 | APBD | | 1 Laporan | 195.000.000 | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|--|---|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BPBD | 1.05.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 94.978 Orang | 3.924.995.254 | APBD | | 94.978 Orang | 3.924.995.254 |
| BPBD | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu | Provinsi DKI Jakarta | 100% | | APBD | | 100% | |
| BPBD | 1.05.03.1.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 1 Dokumen | 224.032.813 | APBD | | 1 Dokumen | 224.032.813 |
| BPBD | 1.05.03.1.04.03 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 1 Dokumen | 65.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | 65.000.000 |
| BPBD | 1.05.03.1.04.07 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | Provinsi DKI Jakarta | 1 Dokumen | 2.462.444.593 | APBD | | 1 Dokumen | 371.851.900 |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Prakiran Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikator | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikator | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BPBD | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | Provinsi DKI Jakarta | | | APBD | | | | |
| BPBD | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | Provinsi DKI Jakarta | | | APBD | | | | |
| BPBD | 1.05.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan Internal dan Eksternal Kantor, dengan nilai: 4 (persepsi sesuai PermenPAN) | Provinsi DKI Jakarta | 4 nilai | | APBD | | 4 nilai | | |
| BPBD | 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 2 Dokumen | 248.548.500 | APBD | | 2 Dokumen | 248.548.500 | |
| BPBD | 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 2 Dokumen | 248.548.500 | APBD | | 2 Dokumen | 248.548.500 | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BPBD | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan | Provinsi DKI Jakarta | 4 nilai | 37.697.866.284 | APBD | | 4 nilai | 37.697.866.284 |
| BPBD | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi DKI Jakarta | 62 Orang /Bulan | 35.738.600.511 | APBD | | 62 Orang/ Bulan | 32.978.825.593 |
| BPBD | 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | Provinsi DKI Jakarta | 4 nilai | 600.000.000 | APBD | | 4 nilai | 600.000.000 |
| BPBD | 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Provinsi DKI Jakarta | 3 Paket | 600.000.000 | APBD | | 3 Paket | 600.000.000 |
| BPBD | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum | Provinsi DKI Jakarta | 4 nilai | 1.724.981.862 | APBD | | 4 nilai | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 126.209.087 | APBD | | 1 Paket | 126.209.087 |
| BPBD | 1.05.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 86.423.812 | APBD | | 1 Paket | 75.322.436 |
| BPBD | 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 204.495.048 | APBD | | 1 Paket | 204.495.048 |
| BPBD | 1.05.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 759.665.130 | APBD | | 1 Paket | 759.665.130 |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Prakirannya Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikator | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikator | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi DKI Jakarta | 12 Laporan | 435.745.828 | APBD | | 12 Laporan | 275.100.000 | |
| BPBD | 1.05.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Provinsi DKI Jakarta | 1 Dokumen | 112.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | 112.000.000 | |
| BPBD | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 4 nilai | 911.253.178 | APBD | | 4 nilai | 911.253.178 | |
| BPBD | 1.05.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 604.344.120 | APBD | | 1 Paket | 604.344.120 | |
| BPBD | 1.05.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 12 Unit | 206.566.560 | APBD | | 12 unit | 545.589.814 | |
| | 1.05.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 unit | 100.342.498 | APBD | | 1 Unit | 100.342.498 | |
| BPBD | 1.05.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 6 Unit | 500.288.100 | APBD | | 6 Unit | 1.716.070.09 | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Prakiran Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | |
| BPBD | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | 161.470.546 | APBD | | 4 Nilai | 161.470.546 | |
| BPBD | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 49.289.506 | APBD | | 1 Laporan | 49.289.506 | |
| BPBD | 1.05.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 112.181.040 | APBD | | 1 Laporan | 112.181.040 | |
| BPBD | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barar Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | 948.644.954 | APBD | | 4 Nilai | 948.644.954 | |
| BPBD | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Provinsi DKI Jakarta | 64 Unit | 767.145.035 | APBD | | 64 Unit | 767.145.035 | |
| BPBD | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Provinsi DKI Jakarta | 100 Unit | 181.499.919 | APBD | | 100 Unit | 181.499.919 | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Prakiran Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| UPT PDIK | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| UPT PDIK | 1.05.3 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | Provinsi DKI Jakarta | | 5.526.985.986 | APBD | | APBD | 5.526.985.986 | |
| UPT PDIK | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Presentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana | Provinsi DKI Jakarta | 100 % | 199.116.082 | APBD | | 100 % | 90.994.613 | |
| | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Kabupaten/ Kota | Provinsi DKI Jakarta | 500 Orang | 199.116.082 | APBD | | 20 Orang | 90.994.613 | |
| UPT PDIK | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah aparat, relawan serta potensi masyarakat lainnya | Provinsi DKI Jakarta | 60 Orang | 223.148.500 | APBD | | 30 Orang | 32.025.000 | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Terhadap Bencana | yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | | | | | |
| | 1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Provinsi DKI Jakarta | 30 Orang | 32.025.000 | APBD | | 30 Orang | 32.025.000 |
| UPT PDIK | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu | Provinsi DKI Jakarta | 100% | 4.852.891.597 | APBD | | 100% | 5.403.966.373 |
| UPT PDIK | 1.05.03.1.04.04 | Pengelolaan dan Pemantapan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | Provinsi DKI Jakarta | 12 Dokumen | 4.852.891.597 | APBD | | 12 Dokumen | 5.403.966.373 |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UPT PDIK | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | Provinsi DKI Jakarta | | | APBD | | | |
| UPT PDIK | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | Provinsi DKI Jakarta | | | APBD | | | |
| UPT PDIK | 1.05.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan Internal dan Eksternal Kantor, dengan nilai: 4 (persepsi sesuai PermenPAN) | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | | APBD | | 4 Nilai | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | 5.000.000 | APBD | | 4 Nilai | 5.000.000 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Provinsi DKI Jakarta | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 5.000.000 |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|--|---|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Kepegawaian | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | 195.742.928 | APBD | | 4 Nilai | 220.285.028 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 195.742.928 | APBD | | 1 Paket | 220.285.028 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | 13.173.779.574 | APBD | | 4 Nilai | 1.088.409.540 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 109.764.448 | APBD | | 1 Paket | 99.809.540 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 11.659.884 | APBD | | 1 Paket | 11.500.000 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 127.132.052 | APBD | | 1 Paket | 128.000.000 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 Paket | 33.113.260 | APBD | | 1 Paket | 26.500.000 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 5.400.000 | APBD | | 1 Laporan | 10.000.000 |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi DKI Jakarta | 1 laporan | 114.289.975 | APBD | | 1 laporan | 12.600.000 |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|--|--|----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Provinsi DKI Jakarta | 1 dokumen | 12.772.419.955 | APBD | | 1 dokumen | 800.000.000 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | 125.737.460 | APBD | | 4 Nilai | 495.990.740 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 8 unit | 125.737.460 | APBD | | 8 unit | 495.990.740 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | 781.123.101 | APBD | | 4 Nilai | 1.038.328.163 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 laporan | 725.032.581 | APBD | | 1 laporan | 956.569.983 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Provinsi DKI Jakarta | 1 laporan | 56.090.520 | APBD | | 1 laporan | 81.758.180 | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Perangkat Daerah | kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Prakirannya Rencana Tahun 2025 | |
|------------------|-----------------|---|---|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 4 Nilai | 1.319.108.097 | APBD | | 4 Nilai | 1.467.781.969 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya | Provinsi DKI Jakarta | 4 unit | 63.304.558 | APBD | | 4 unit | 50.398.172 | |
| UPT PDIK | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Provinsi DKI Jakarta | 97 Unit | 1.255.803.539 | APBD | | 97 Unit | 1.381.424.570 | |

Penutup dokumen Renja

PENUTUP



Dokumen Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2024. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2026 dengan mempedomani RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Fungsi Renja 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta terutama kegiatan "Pengelolaan Pengurangan Resiko Bencana".

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2024 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2025.

Selanjutnya, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

Jakarta, 28 Juli 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Isnawa Adji
Drs. Isnawa Adji, M.A.P.
NIP. 197205241992031002